



LAPORAN KEUANGAN

AUDITED - 2025

2025

Alamat:

**Jl. By Pass Km.6 Cot
Ba'U Kec. Sukajaya
Kota Sabang**



**Kemenkes
BKK Sabang**

Antinanan Kesehatan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan IV Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menilai akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sabang, 30 April 2026

Plt. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang



Khaidir, SKM

NIP. 197906242012121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR SINGKATAN	v
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	vii
LAPORAN KEUANGAN	
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
DAFTAR LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Anggaran Tahun 2025 Audited dan 2024 Audited	1
Tabel 2	Realisasi Anggaran per Tahun 2025 Audited Berdasarkan Blokir Inpres	1
Tabel 3	Ringkasan Neraca Per Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	2
Tabel 4	Ringkasan Laporan Operasional untuk periode Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited.....	3
Tabel 5	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited.....	3
Tabel 6	Kebijakan Penyisihan Piutang berdasarkan Kualitas Piutang.....	16
Tabel 7	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	18
Tabel 8	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	19
Tabel 9	Kertas Kerja Capaian Output Satker Balai Kesehatan Kesehatan Kelas II sabang	21
Tabel 10	Kertas Kerja Capaian Output Kegiatan Prioritas	22
Tabel 11	Kertas Kerja Capaian Output Kegiatan Non Prioritas.....	23
Tabel 12	Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi Terakhir	24
Tabel 13	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025 Audited.....	25
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	25
Tabel 15	Rincian Realisasi Belanja Per Jenis Belanja	26
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	28
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Pegawai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	29
Tabel 18	Perbandingan Belanja Barang Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited.....	30
Tabel 19	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited.....	31
Tabel 20	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	31
Tabel 21	Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	32
Tabel 22	Perbandingan Rincian Piutang PNPB Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	33
Tabel 23	Perbandingan Saldo Persediaan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	34
Tabel 24	Mutasi Persediaan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	34
Tabel 25	Mutasi Tanah.....	36
Tabel 26	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	36
Tabel 27	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	37
Tabel 28	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	37
Tabel 29	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 Audited	38
Tabel 30	Rincian Aset Lain-lain Tahun 2025 Audited	38
Tabel 31	Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Tahun 2025 Audited	39
Tabel 32	Perbandingan Rincian Pendapatan-LO Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	41
Tabel 33	Perbandingan Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	42
Tabel 34	Perbandingan Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	43
Tabel 35	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	44
Tabel 36	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	44
Tabel 37	Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	45
Tabel 38	Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	45
Tabel 39	Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	46
Tabel 40	Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited	47
Tabel 41	Rincian Transaksi Antar Entitas.....	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi Anggaran per-Jenis Belanja Tahun 2025 Audited	27
Grafik 2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 Audited	27

DAFTAR SINGKATAN

AA	: <i>Automatic Adjustment</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BA BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
B2P2	: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
B2P2TOOT	: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional
B2P2VRP	: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BKPK	: -----
BMN	: Barang Milik Negara
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
Caput	: Capaian Output
COVID	: <i>Corona Virus Disease</i>
DDEL	: Diterima Dari Entitas Lain
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DKEL	: Ditagihkan Kepada Entitas Lain
JIJ	: Jalan, Irigasi, dan Jaringan
KCP	: Kantor Cabang Pembantu
KD	: Kantor Daerah
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
KP	: Kantor Pusat
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Litbang	: Penelitian dan Pengembangan
Litbangkes	: Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas

LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
PC PEN	: Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PCR	: Polymerase Chain Reaction
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PTN BH	: Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
RI	: Republik Indonesia
Riskesnas	: Riset Kesehatan berskala Nasional
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RSUP	: Rumah Sakit Umum Pusat
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintah
SARS-CoV-2	: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
Satker	: Satuan Kerja
SIMAK BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPM	: Surat Perintah Membayar
SSGI	: Studi Status Gizi Indonesia
TA	: Tahun Anggaran
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
THR	: Tunjangan Hari Raya
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
UAPPA/B-E1	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon-1
UP	: Uang Persediaan
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan UAKPA periode Tahun 2025 (*Audited*) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Lampiran LK Sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-208/PB/2025 Per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sabang, 30 April 2026

**Plt. Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Sabang**



Khaidir, SKM

NIP 197906242012121001



A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Tahun 2025 *Audited*.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2025 *Audited* adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 95.378.200 atau mencapai 100,54 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp94.867.000.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2025 *Audited* adalah sebesar Rp7.179.023.404 atau mencapai 78,55 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.139.825.000 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 *Audited* disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Realisasi Anggaran Tahun 2025 *Audited* dan Tahun 2024 *Audited*

Uraian	31 Des 2025			31 Desember 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	94,867,000	95,378,200	100.54	59,500,900
PNBP	94,867,000	95,378,200	100.54	59,500,900
Belanja Negara	9,139,825,000	7,179,023,404	78.55	7,290,679,141
51 Belanja Pegawai	4,805,568,000	4,671,123,591	97.20	4,196,230,218
52 Belanja Barang	3,855,274,000	2,234,249,096	57.95	2,761,617,323
53 Belanja Modal	478,983,000	273,650,717	57.13	332,831,600

Namun demikian, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat pagu blokir pada satker BKK Sabang (449984), sehingga realisasi Anggaran berdasarkan inpres dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Tabel 2
Realisasi Anggaran per Tahun 2025 *Audited* Berdasarkan Blokir Inpres

Satker	Pagu Harian	Realisasi per 31 Desember 2025		Blokir Inpres	Pagu Efektif	% Realisasi
		Nominal	%			
449984	9.139.825.000	7.179.023.404	78.55%	1.798.322.000	7.341.503.000	97.79%



B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025. Nilai Aset per Tahun 2025 *Audited* dicatat dan disajikan sebesar Rp5.903.163.033 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp152.048.605; Aset Tetap (neto) sebesar Rp5.751.114.428; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5.903.163.033.

Ringkasan Neraca per Tahun 2025 *Audited* disajikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 3
Ringkasan Neraca Per Tahun 2025 *Audited* dan Tahun 2024 *Audited*

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp.)	%
Aset				
Aset Lancar	152,048,605	58,849,270	93,199,335	158.37
Aset Tetap	5,751,114,428	6,158,125,239	(407,010,811)	(6.61)
Aset Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Aset	5,903,163,033	6,216,974,509	(313,811,476)	(5.05)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0.00
Ekuitas				
Ekuitas	5,903,163,033	6,216,974,509	(313,811,476)	(5.05)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5,903,163,033	6,216,974,509	(313,811,476)	(5.05)

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 *Audited* adalah sebesar Rp92.478.200, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.577.437.611 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp7.484.959.411. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.900.000 sehingga entitas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang mengalami Defisit-LO sebesar Rp7.482.059.411.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 *Audited* disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 4
Ringkasan Laporan Operasional
untuk periode Tahun 2025 *Audited* dan Tahun 2024 *Audited*

Uraian	Periode yg Berakhir sampai dengan		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Des 2025	31 Des 2024	(Rp.)	%
Pendapatan				
PNBP	92,478,200	51,607,600	40,870,600	79.19
Jumlah Pendapatan	92,478,200	51,607,600	40,870,600	79.19
Beban				
Beban Operasional	7,577,437,611	8,001,192,887	(423,755,276)	(5.30)
Jumlah Beban	7,577,437,611	8,001,192,887	(423,755,276)	(5.30)
Defisit Kegiatan Operasional	(7,484,959,411)	(7,949,585,287)	464,625,876	(5.84)
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	2,900,000	5,253,300	(2,353,300)	(44.80)
Defisit-LO	(7,482,059,411)	(7,944,331,987)	462,272,576	(5.82)

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 *Audited* dibandingkan dengan tahun Tahun 2024 *Audited*. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp6.216.974.509 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(7.482.059.411); kemudian dikurangi Koreksi yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp (0); kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.168.247.935 sehingga Ekuitas entitas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang pada Tahun 2025 *Audited* adalah sebesar Rp5.903.163.033.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 *Audited* disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
untuk periode Tahun 2025 *Audited* dan Tahun 2024 *Audited*

Uraian	Periode yg Berakhir sampai dengan		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Des 2025	31 Des 2024	(Rp.)	%
Ekuitas Awal	6,216,974,509	6,969,040,023	(752,065,514)	(10.79)
Defisit LO	(7,482,059,411)	(7,944,331,987)	462,272,576	(5.82)
Koreksi Yang Menambah/mengurangi Ekuitas	-	(15,846,368)	15,846,368	(100.00)
Transaksi Antar Entitas	7,168,247,935	7,208,112,841	(39,864,906)	(0.55)
Ekuitas Akhir	5,903,163,033	6,216,974,509	(313,811,476)	(5.05)



E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir Tahun 2025 *Audited* disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
Tahun 2025 Audited DAN Tahun 2024 Audited

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 Desember 2025		% thd Angg	31 Desember 2024		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	94,867,000	95,378,200	100.54	94,132,000	59,500,900	63.21
JUMLAH PENDAPATAN		94,867,000	95,378,200	100.54	94,132,000	59,500,900	63.21
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	4,805,568,000	4,671,123,591	97.20	4,338,665,000	4,196,230,218	96.72
Belanja Barang	B.4	3,855,274,000	2,234,249,096	57.95	2,932,112,000	2,761,617,323	94.19
Belanja Modal	B.5	478,983,000	273,650,717	57.13	338,726,000	332,831,600	98.26
JUMLAH BELANJA		9,139,825,000	7,179,023,404	78.55	7,609,503,000	7,290,679,141	95.81



II. NERACA

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG
NERACA

Tahun 2025 Audited DAN Tahun 2024 Audited

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	-	-
Persediaan	C.1.3	152,048,605	58,849,270
Jumlah Aset Lancar		152,048,605	58,849,270
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	1,483,178,000	1,483,178,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	10,729,050,657	10,455,399,940
Gedung dan Bangunan	C.2.3	4,259,854,800	4,259,854,800
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	19,426,000	19,426,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5	(10,740,395,029)	(10,059,733,501)
Jumlah Aset Tetap		5,751,114,428	6,158,125,239
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3.1	27,300,000	27,300,000
Akum. Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(27,300,000)	(27,300,000)
Jumlah Aset Lainnya		0	-
JUMLAH ASET		5,903,163,033	6,216,974,509
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5	5,903,163,033	6,216,974,509
JUMLAH EKUITAS		5,903,163,033	6,216,974,509
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5,903,163,033	6,216,974,509



III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
Tahun 2025 Audited DAN Tahun 2024 Audited

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	92,478,200	51,607,600
JUMLAH PENDAPATAN		92,478,200	51,607,600
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4,671,123,591	4,196,230,218
Beban Persediaan	D.3	126,266,527	342,369,721
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,567,506,582	1,640,944,979
Beban Pemeliharaan	D.5	271,629,610	391,976,141
Beban Perjalanan Dinas	D.6	257,693,993	650,095,118
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masy	D.7	2,555,780	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	680,661,528	779,576,710
JUMLAH BEBAN		7,577,437,611	8,001,192,887
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7,484,959,411)	(7,949,585,287)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar		-	(2,640,000)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	2,640,000
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban JP		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban JP		-	-
Surplus (Defisit) Keg. Non Operasional Lainnya		2,900,000	7,893,300
Pendapatan dari Kegiatan N.O Lainnya		2,900,000	7,893,300
Beban dari Kegiatan N.O Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEG NON OPERASIONAL	D.9	2,900,000	5,253,300
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7,482,059,411)	(7,944,331,987)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		(7,482,059,411)	(7,944,331,987)



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
Tahun 2025 Audited DAN Tahun 2024 Audited

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	6,216,974,509	6,969,040,023
<i>SURPLUS/DEFISIT LO</i>	E.2	<i>(7,482,059,411)</i>	<i>(7,944,331,987)</i>
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	0	0
SELISIH REVALUASI (REKLASIFIKASI)	E.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.5	-	(15,846,368)
<i>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</i>	E.6	<i>7,168,247,935</i>	<i>7,208,112,841</i>
KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS		(313,811,476)	(752,065,514)
EKUITAS AKHIR	E.7	5,903,163,033	6,216,974,509



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.5/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan;



13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan keuangan Kementerian Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KMK.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka penyusutan BMN berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
21. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
22. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
23. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL Tahun 2024 (*Audited*).



*Profil dan
Kebijakan Teknis*

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan Kementerian/ Lembaga sehingga pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan, dengan menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
3. pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
5. pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.



SAI terdiri dari Modul GLP, Modul Aset dan Modul Persediaan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan Modul Aset dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi persediaan, aset tetap, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang TA 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

A.4. Basis Akuntansi (The Timing Rule)

Basis Akuntansi

Ini adalah aturan dasar mengenai kapan suatu transaksi atau peristiwa ekonomi diakui dan dicatat dalam pembukuan, terlepas dari kapan kasnya diterima atau dikeluarkan. Fungsinya untuk menentukan momen pencatatan transaksi, yang sangat mempengaruhi kapan pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban muncul di laporan keuangan.

Ada dua basis akuntansi dasar yakni basis kas dan basis akrual. Basis Kas (*Cash Basis*): Transaksi dicatat hanya ketika kas diterima atau dikeluarkan. Pendapatan diakui saat kas diterima, belanja diakui saat kas dibayarkan.

Penerapan di Pemerintah: Digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Contoh: Pendapatan Pajak dicatat di LRA hanya ketika uang pajak sudah masuk ke kas negara. Belanja pegawai dicatat di LRA saat gaji sudah dibayarkan.

Basis Akrual (*Accrual Basis*): Transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayar. Pendapatan diakui saat hak untuk menerima telah ada, beban diakui saat kewajiban untuk membayar telah timbul.

Penerapan di Pemerintah: Digunakan untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas. Contoh:



Piutang pajak diakui saat masa pajak berakhir (meskipun belum dibayar). Beban gaji diakui saat pegawai telah bekerja (meskipun belum dibayar).

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang adalah sebagai berikut:



Pendapatan-LRA (1) *Pendapatan- LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah Netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO (2) *Pendapatan- LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah Netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) *Belanja*

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode



tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) *Beban*

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) *Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. *Aset Lancar*

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Kebijakan Penyisihan Piutang berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:



- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000; (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa penggunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,



dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun



Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.5/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise, Peta RBI Skala Besar, Peta LPI Skala Besar, Peta Batas Wilayah Administrasi, Citra Satelit Resolusi Tinggi, Foto Udara, Peta Tematik Morfometri, Peta Tematik Penutup Lahan, Peta Tematik Sistem Lahan, Peta Tematik Lainnya	5



Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Peta RBI Skala Menengah, Peta Batas Wilayah Administrasi, Peta Batas Negara, Data Pengukuran Sifat Dasar Teliti, Citra Satelit Resolusi Sedang, Atlas	10
Peta LLN Skala Menengah, Peta LPI Skala Menengah	12
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim, Peta LLN Skala Kecil, Peta LPI Skala Kecil, Data Pasang Surut, Data GNSS, Data Gaya berat	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produsen Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal



pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung yang kemudian disesuaikan apabila ada pemenuhan kewajiban, baik sebagian maupun keseluruhan.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Capaian Output Satker

A.7. Capaian Output Satker

Sampai dengan periode Tahun 2025 *Audited*, kertas kerja capaian output pada satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Kertas Kerja Capaian Output Satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang

No	Nama Satker	DIPA Revisi Ke-	Jumlah output DIPA	Konfirmasi Capaian Output			% Data Masuk
				Terkonfirmasi	Tidak Terkonfirmasi	Jumlah	
1	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG	13	30	30	0	30	100

Monitoring Kinerja Satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang dapat di lihat di Lampiran Laporan Keuangan.

Capaian Output Program Prioritas Nasional

A.8. Capaian Output Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.



Pelaksanaan Program Prioritas Nasional III - Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, Pelaksanaanya diantaranya melalui 17 program prioritas yang tersebar di 2 Wilayah Kerja dan 1 Layanan kantor induk pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang dengan pagu mencapai Rp1.339.433.000 dan realisasi sebesar Rp457.993.946, dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Kertas Kerja Capaian Output Kegiatan Prioritas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang

No	RO	Anggaran			Output				
		Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Persen Progres	Target RVRO	Target PCRO (%)
1	Sosialisasi dan Diseminasi (HS)	187,880,000	-	0.00	469	Orang	100	469	100
2	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	20,445,000	12,285,000	60.09	292	Orang	100	292	100
3	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	25,998,000	1,008,000	3.88	31	layanan	100	31	100
4	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	140,330,000	3,060,000	2.18	66	layanan	100	66	100
5	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan	115,500,000	56,980,000	49.33	175	layanan	100	175	100
6	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS)	80,000,000	72,160,000	90.20	50	layanan	100	50	100
7	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	14,712,000	6,032,000	41.00	12	layanan	100	12	100
8	Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	49,827,000	23,552,749	47.27	17	layanan	100	17	100
9	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	2,892,000	1,320,000	45.64	6	layanan	100	6	100
10	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	4,320,000	-	0.00	12	layanan	100	12	100
11	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	15,480,000	7,650,000	49.42	9	layanan	100	9	100
12	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	6,360,000	-	0.00	12	layanan	100	12	100
13	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	7,884,000	3,748,000	47.54	6	layanan	100	6	100
14	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	32,730,000	31,648,000	96.69	6	layanan	100	6	100
15	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	3,880,000	1,330,000	34.28	4	layanan	100	4	100
16	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu	531,781,000	237,220,197	44.61	33	Paket	100	33	100
17	Pelatihan kesehatan (HS)	99,414,000	-	0.00	7	Orang	100	11.11	100
Kegiatan Prioritas Nasional		1,339,433,000	457,993,946	34.19	Tiga Puluh Empat Koma Sembilan Belas				

Capaian Output Non Program Prioritas Nasional

A.9. Capaian Output Non Program Prioritas Nasional

Adapun selain capaian output program perioritas nasional, BKK Kelas II Sabang juga memiliki beberapa program dan layanan lain yang bukan merupakan layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Layanan tersebut lebih kepada layanan yang berorientasi pada tata laksana administrasi dan hal umum lainnya yang berada pada BKK Sabang.

Capaian output non program nasional tersebut dapat dilihat pada



tabel dibawah ini. Berdasarkan data yang diambil dari aplikasi Kementerian Keuangan (Omspan), dapat kita lihat bahwa pagu mencapai Rp7.800.392.000 dan realisasi sebesar Rp6.721.029.458.

Tabel 11
Kertas Kerja Capaian Output Kegiatan Non Prioritas
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang

No	RO	Anggaran			Output				
		Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Persen Progres	Target RVRO	Target PCRO(%)
1	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	79,600,000	79,600,000	100.00	5	Unit	100	5	100
2	Layanan BMN	24,002,000	9,593,480	39.97	2	layanan	100	2	100
3	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	16,961,000	10,955,000	64.59	2	layanan	100	2	100
4	Layanan Umum	158,398,000	17,009,735	10.74	12	layanan	100	12	100
5	Layanan Perkantoran	6,987,266,000	6,306,199,965	90.25	12	layanan	100	12	100
6	Layanan Sarana Internal	100,562,000	93,001,500	92.48	11	Unit	100	11	100
7	Layanan Manajemen SDM	9,822,000	-	0.00	1	Orang	100	1	100
8	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	204,735,000	132,972,000	64.95	25	Orang	100	25	100
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	146,618,000	56,206,298	38.34	9	dokumen	100	9	100
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	20,144,000	400,000	1.99	4	dokumen	100	4	100
11	Layanan Manajemen Keuangan	36,543,000	15,091,480	41.30	8	dokumen	100	8	100
12	Layanan Reformasi Kinerja	13,805,000	-	0.00	1	dokumen	100	1	100
13	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,936,000	-	0.00	1	dokumen	100	1	100
Kegiatan Non Prioritas Nasional		7,800,392,000	6,721,029,458	86.16	Delapan Puluh Enam Koma Enam Belas				

Berdasarkan data tersebut, capaian output satker secara keseluruhan sebagai berikut.

Pagu kegiatan prioritas : 1.339.433.000

Pagu kegiatan non prioritas : 7.800.392.000

Total Pagu : 9.139.825.000

Realisasi kegiatan prioritas : 457.993.946

Realisasi kegiatan non prioritas : 6.721.029.458

Total Realisasi : 7.179.023.404



B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode Tahun 2025 *Audited*, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sampai dengan revisi ke 13. Perbandingan pagu anggaran awal dan revisi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2025 *Audited* adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi Terakhir

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah Gedung Bangunan	307,000	307,000
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	9,200,000	9,200,000
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	64,810,000	64,810,000
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	20,550,000	20,550,000
Jumlah Pendapatan	94,867,000	94,867,000
Belanja		
Belanja Pegawai	4,507,054,000	4,805,568,000
Belanja Barang	3,901,603,000	3,855,274,000
Belanja Modal	432,654,000	478,983,000
Jumlah Belanja	8,841,311,000	9,139,825,000

Selisih revisi anggaran awal dengan revisi terakhir bisa kita lihat perbedaan pada Belanja Pegawai, ini terjadi kenaikan karena adanya penambahan gaji bagi PPPK yang baru sejumlah 12 Orang. Pengurangan terjadi pada Belanja Barang karena beralih anggaran ke Belanja Modal. Belanja Modal bertambah dari proses peralihan tersebut untuk pembelian alat pengolah data dan informasi.

**Realisasi
Pendapatan
Rp95.378.200**

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun 2025 *Audited* adalah sebesar Rp95.378.200 atau mencapai 100,54 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp94.867.000.

Pendapatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang terdiri dari Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Layanan Fasilitas Kesehatan, Jasa Karantina Kesehatan, Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan, Penerimaan Kembali Beban



Pegawai Tahun Anggaran yang lalu dan Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran yang lalu. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 Audited

No	Uraian	per 31 Desember 2025		
		Estimasi	Realisasi	% Real Est.
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	307,000	-	-
2	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	358,200	-
3	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	9,200,000	2,890,000	31.41
4	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	64,810,000	43,670,000	67.38
5	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	20,550,000	45,560,000	221.70
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,200,000	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,700,000	-
	Jumlah	94,867,000	95,378,200	100.54

Realisasi Pendapatan sampai dengan Tahun 2025 Audited mengalami kenaikan sebesar 60.30 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2024 Audited. Kenaikan realisasi pendapatan secara signifikan terjadi pada Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan, hal ini meningkat dikarenakan diwajibkannya vaksinasi polio bagi jamaah umrah yang juga berdampak pada kenaikan pendapatan secara signifikan. Pencapaian penerimaan ini bahkan capai 221.70% dari target Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan.

Diteliti lebih jauh, kenaikan penerimaan Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan juga mengalami peningkatan 130.22% dari tahun yang lalu pada periode yang sama. Adapun rincian kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada rincian berikut ini.



Tabel 14
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 Audited dan
Tahun 2024 Audited

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	477,600	100.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	358,200	-	-
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	2,890,000	2,670,000	8.24
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	43,670,000	28,670,000	52.32
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	45,560,000	19,790,000	130.22
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun anggaran Yang lalu	1,200,000	1,644,150	(27.01)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun anggaran Yang lalu	1,700,000	6,249,150	(72.80)
Jumlah	95,378,200	59,500,900	60.30

Realisasi
Belanja
Rp7.179.023.40
4

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 Audited adalah sebesar Rp7.179.023.404 atau 78,55 persen dari anggaran belanja sebesar Rp9.139.825.000.

Tabel 15
Rincian Realisasi Belanja Per Jenis Belanja

URAIAN	31 Desember 2025		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	4,805,568,000	4,671,123,591	97.20
Belanja Barang	3,855,274,000	2,234,249,096	57.95
Belanja Modal	478,983,000	273,650,717	57.13
Total Belanja Kotor	9,139,825,000	7,179,023,404	78.55
Pengembalian Belanja	0	0	0.00
Total Belanja	9,139,825,000	7,179,023,404	78.55

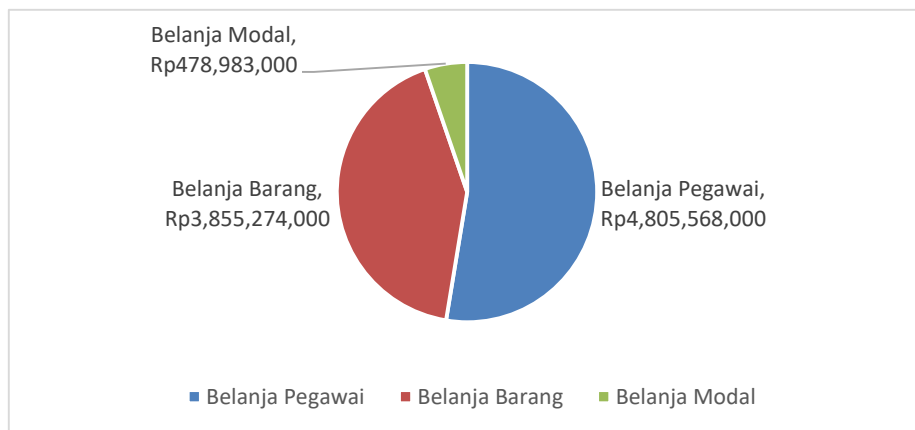
Untuk komponen realisasi belanja, perlu kami berikan *disclaimer* atau catatan khusus bahwa pagu efektif (pagu yang bisa dipakai setelah blokir) hanyalah 7.341.503.000,-. Sehingga realisasi 7.179.023.404,- dapat dikatakan mencapai 97.79 persen sebagaimana telah kami sebutkan pada tabel 2.

Meskipun demikian, pada laporan ini akan kami sampaikan penyajian data sesuai dengan laporan yang dihasilkan dari hasil



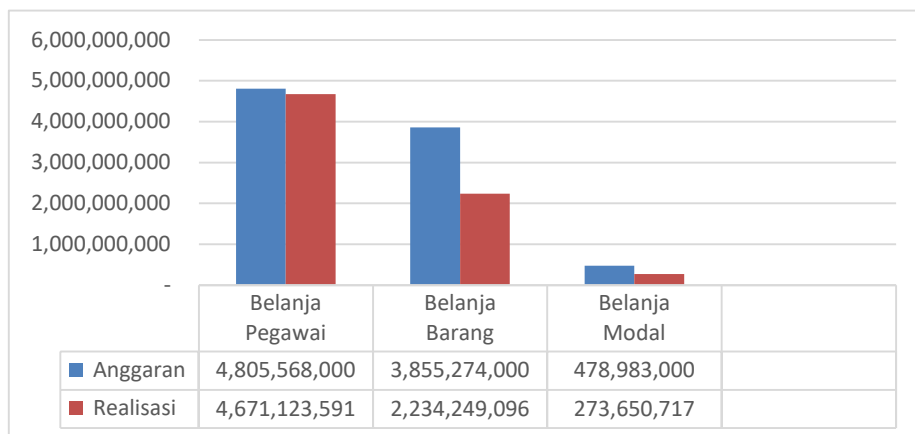
rekonsiliasi satker dengan KPPN. Komposisi anggaran per jenis belanja, dapat dilihat dalam grafik berikut,

Grafik 1
Komposisi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025 Audited



Komposisi anggaran dan realisasi per jenis belanja, dapat dilihat dalam grafik berikut,

Grafik 2
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 Audited



Dibandingkan dengan periode tahun anggaran sebelumnya, Realisasi Belanja sampai dengan Tahun 2025 Audited menurun sebesar 1,53 persen. Realisasi Belanja sampai dengan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp7.179.023.404 dan Rp7.290.679.141. Penurunan ini terjadi



pada Belanja Barang dan Belanja Modal karena terdapat pagu blokir. Perbandingan realisasi belanja disajikan sebagai berikut.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

URAIAN	REALISASI NETO 31 DES 2025	REALISASI NETO 31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4,671,123,591	4,196,230,218	11.32
Belanja Barang	2,234,249,096	2,761,617,323	(19.10)
Belanja Modal	273,650,717	332,831,600	(17.78)
Jumlah	7,179,023,404	7,290,679,141	(1.53)

Belanja Pegawai
Rp4.671.123.591

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp4.671.123.591 dan Rp4.196.230.218. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Tabel 17
Perbandingan Realisasi Pegawai Tahun 2025 Audited dan
Tahun 2024 Audited

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,019,475,656	2,001,593,601	0.89
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	211,976,538	42,911,797	393.98
Belanja Lembur	138,398,000	5,765,000	2,300.66
Belanja Tunjangan Khusus/Kinerja	2,301,273,397	2,146,886,198	7.19
Jumlah Belanja Kotor	4,671,123,591	4,197,156,596	11.29
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(926,378)	(100.00)
Jumlah Belanja	4,671,123,591	4,196,230,218	11.32

Realisasi belanja pegawai Tahun 2025 Audited mengalami peningkatan sebesar 11,32 persen dibandingkan Tahun 2024 Audited. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah ASN terutama PPPK di lingkungan BKK Sabang. Kenaikan signifikan bisa dilihat pada bagian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yang naik drastis hingga 393.98 persen. Dengan adanya penambahan ini maka belanja pegawai lainnya juga ikut naik termasuk lembur pegawai dan PPPK. Kenaikan ini juga disebabkan karena kegiatan tuisi (tugas dan fungsi) yang selama ini terbayarkan dengan belanja 52 sebagian besar diblokir sehingga kegiatan tuisi tersebut dibayarkan dengan lembur.

Belanja Barang
Rp2.234.249.096

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp2.234.249.096 dan Rp2.761.617.323.

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 Audited mengalami penurunan sebesar 19,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.



Komponen belanja barang hampir seluruhnya mengalami penurunan realisasi kecuali Belanja Barang Persediaan dan Belanja Jasa. Belanja Persediaan terjadi peningkatan karena bertambahnya jumlah ASN sebagai pengguna persediaan di BKK Sabang, sedangkan Belanja Jasa meningkat karena pada tahun ini diselenggarakannya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Perubahan Pola Fikir dan Budaya Kerja serta Peningkatan Kerjasama Tim bagi seluruh ASN BKK Kelas II Sabang.

Berikut ini perbandingan realisasi belanja barang Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited.

Tabel 18
Perbandingan Belanja Barang Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	230,963,678	281,947,036	(18.08)
Belanja Barang Non Operasional	289,883,518	486,079,327	(40.36)
Belanja Barang Persediaan	146,805,111	85,103,315	72.50
Belanja Jasa	1,046,659,386	870,003,616	20.31
Belanja Pemeliharaan	262,243,410	388,388,911	(32.48)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	257,693,993	650,095,118	(60.36)
Jumlah Belanja Kotor	2,234,249,096	2,761,617,323	(19.10)
Pengembalian Belanja	0	0	0.00
Jumlah Belanja	2,234,249,096	2,761,617,323	(19.10)

Belanja Modal
Rp273.650.717

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp273.650.717 dan Rp332.831.600. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 Audited mengalami penurunan sebesar 17.78 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.



Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 Audited dan
Tahun 2024 Audited

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273,650,717	107,949,600	153.50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	224,882,000	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	273,650,717	332,831,600	(17.78)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	273,650,717	332,831,600	(17.78)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 Audited adalah sebesar Rp273.650.717, mengalami kenaikan sebesar 153,50 persen bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 Audited sebesar Rp107.949.600.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273,650,717	107,949,600	153.50
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	273,650,717	107,949,600	153.50
Pengembalian Belanja	0	0	0.00
Jumlah Belanja	273,650,717	107,949,600	153.50

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp224.882.000. Tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun pelaporan ini.



C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar
Rp173.405.359

C.1 Aset Lancar
Jumlah Aset Lancar Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang per Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah sebesar Rp173.405.359 dan Rp58.849.270.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai (dihabiskan) atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp0

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Setiap menjelang akhir tahun periode pengelolaan keuangan, kas yang dikuasai bendahara diharapkan untuk segera di nihilkan. Adapun jika masih terdapat sisa yang belum dibelanjakan agar segera dilakukan Pengembalian ke Negara.

Tabel 21
Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

KETERANGAN	31 DES 2025	31 DES 2024
Kas di bendahara pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB
Rp0

C.1.2 Piutang PNB
Saldo Piutang PNB Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Sama halnya dengan kas di bendahara, piutang dipastikan untuk nihil pada tiap akhir periode pengelolaan keuangan.



Tabel 22
Perbandingan Rincian Piutang PNBP
Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

KETERANGAN	31 DES 2025	31 DES 2024
Piutang Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Kebijakan akuntansi terkait piutang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampiran Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Buletin Teknis (Bultek) terkait, seperti PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Bultek SAP No. 16 tentang Akuntansi Piutang.

Piutang pemerintah diakui di Laporan Keuangan (Neraca) ketika hak untuk menagih telah timbul dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pengakuan ini umumnya berbasis akrual, artinya dicatat saat transaksi terjadi, bukan saat uang kas diterima. Piutang diukur pada nilai nominal atau nilai bruto pada saat pengakuan. Ini adalah jumlah yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Penilaian piutang berfokus pada penyajian piutang di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value/NRV*). Artinya, nilai piutang yang disajikan adalah jumlah yang benar-benar diharapkan akan diterima. Untuk mencapai NRV ini, pemerintah membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (PNTT).

*Persediaan
Rp152.048.
605*

C.1.3 Persediaan

Nilai Persediaan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp152.048.605 dan Rp58.849.270.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah



sebagai berikut:

Tabel 23
Perbandingan Saldo Persediaan
Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

JENIS	31 DES 2025	31 DES 2024
Barang Konsumsi	107,435,949	55,370,090
Bahan untuk Pemeliharaan	-	400,000
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	44,612,656	3,079,180
Persediaan Belum Diregister	-	-
Jumlah	152,048,605	58,849,270

Adapun barang konsumsi senilai 107.435.949 terdiri dari beragam barang seperti alat tulis, penjepit kertas, alat perekat dan berbagai barang persediaan lainnya. Secara lebih lengkap dapat diteliti pada lampiran Laporan Barang Persediaan dibagian akhir yang tidak terpisahkan dengan laporan ini. Sedangkan Persediaan lainnya senilai 44.612.656 merupakan persediaan dalam bentuk barang berupa obat cair.

Berikut adalah rincian penambahan/pengurangan nilai Persediaan pada Tahun 2025 Audited sebagai berikut:

Tabel 24
Mutasi Persediaan
Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2024	Rp	58,849,270
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	146,805,111
Reklasifikasi Masuk		0
Mutasi kurang:		
Habis Pakai		(53,605,776)
Saldo per 31 Des 2025	Rp	152,048,605

Realisasi pembelian persediaan senilai: 146.805.111 adalah sebagai berikut:

Belanja Peralatan Boarding/Matra/Situasi Khusus	24,787,000
Belanja Pengadaan alat/bahan medis dan non medis untuk pelayanan kesehatan	34,038,179
Belanja Sarana dan prasarana pengawasan vektor	15,174,652
Belanja Sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	5,110,830
Belanja Pengadaan Alat dan Bahan Penunjang Kekeparantinaan	25,614,450
Belanja Dukungan operasional perkantoran	2,515,000
Belanja Keperluan Perkantoran	39,565,000

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan diatur dalam PSAP 05



tentang Akuntansi Persediaan (bagian dari PP 71 Tahun 2010). Pengakuan persediaan terjadi saat barang diterima atau hak kepemilikan dan kendalinya beralih ke pemerintah, meskipun belum dibayar penuh. Ini konsisten dengan basis akrual.

Persediaan diperuntukkan bagi masyarakat maupun kantor dapat dibagi menjadi beberapa kategori; untuk masyarakat persediaan bisa berupa barang kebutuhan pokok, obat-obatan, atau bantuan sosial dalam hal terjadi kejadian luar biasa (KLB). Sementara untuk kantor, persediaan meliputi alat tulis kantor, perlengkapan kebersihan, serta barang-barang yang digunakan untuk operasional kantor.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp5.751.114.428

Jumlah Aset Tetap Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah sebesar Rp5.751.114.428 dan Rp6.158.125.239. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Dasar penilaian aset tetap diatur dalam PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap (bagian dari PP 71 Tahun 2010). Ada beberapa dasar penilaian yang digunakan, tergantung cara perolehannya; biaya perolehan atau nilai wajar. Kemudian, setelah diakui dan diukur baik dengan biaya perolehan maupun nilai wajar maka aset tetap yang memiliki masa manfaat terbatas (sebagian besar aset tetap, kecuali tanah dan aset bersejarah tertentu) akan mengalami penyusutan (*depreciation*).

Tanah
Rp1.483.178.000

C.2.1 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp1.483.178.000 dan Rp1.483.178.000. Tanah diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Seluruh Tanah yang terdata dalam data BMN dikuasai oleh BKK Sabang dan sudah dilakukan PSP (Penetapan Status Penggunaan).

Tabel 25
Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2024	Rp	1,483,178,000
Mutasi tambah:		0
Mutasi kurang:		0
Saldo per 31 Des 2025	Rp	1,483,178,000

*Peralatan
dan Mesin
Rp10.729.0
50.657*

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp10.729.050.657 dan Rp10.455.399.940.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Seluruh Peralatan dan Mesin yang terdata dalam data BMN dikuasai oleh BKK Sabang dan belum seluruhnya dilakukan PSP (Penetapan Status Penggunaan).

Tabel 26
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2024	Rp	10,455,399,940
Mutasi tambah:	Rp	273,650,717
Mutasi Kurang:	Rp	-
Saldo per 31 Des 2025	Rp	10,729,050,657
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025	Rp	(9,746,797,926)
Nilai Buku per 31 Des 2025	Rp	982,252,731

Adapun mutasi tambah senilai 273.650.717 terdiri dari beragam transaksi pembelian BMN seperti Incubator, Meubelair dan berbagai barang peralatan mesin lainnya. Secara lebih lengkap dapat diteliti pada lampiran Daftar Transaksi BMN dibagian akhir yang tidak terpisahkan dengan laporan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp4.259.854.
800*

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah Rp4.259.854.800 dan Rp4.259.854.800.



Tabel 27
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2024	Rp	4,259,854,800
Mutasi tambah:		
Mutasi kurang:		
Saldo per 31 Des 2025	Rp	4,259,854,800
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025		(982,622,525)
Nilai Buku per 31 Des 2025	Rp	3,277,232,275

Akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2025 Audited sebesar Rp982.622.525, yang mengurangi nilai perolehan aset sebesar Rp4.259.854.800 sehingga nilai buku menjadi Rp3.277.232.275. Akumulasi penyusutan terjadi karena penggunaan gedung dan bangunan secara berkelanjutan dalam mendukung operasional, yang mengakibatkan penurunan nilai aset seiring dengan berjalannya waktu dan umur manfaatnya. Penyusutan ini dihitung berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Seluruh Gedung dan Bangunan yang terdata dalam data BMN dikuasai oleh BKK Sabang dan seluruhnya sudah dilakukan PSP (Penetapan Status Penggunaan).

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp19.426.00
0*

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp19.426.000 dan Rp19.426.000.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tabel 28
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2024	Rp	19,426,000
Mutasi tambah:		0
Mutasi kurang:		0
Saldo per 31 Des 2025	Rp	19,426,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025	Rp	(10,974,578)
Nilai Buku per 31 Des 2025	Rp	8,451,422



C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing Rp (10.740.395.029) dan Rp (10.059.733.501).

Rp (10.740.395.029) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Tabel 29
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 Audited

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10,729,050,657	9,746,797,926	982,252,731
2	Gedung dan Bangunan	4,259,854,800	982,622,525	3,277,232,275
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19,426,000	10,974,578	8,451,422
4	Aset Tetap Lainnya			
	Jumlah	15,008,331,457	10,740,395,029	4,267,936,428

Aset Lain-

Lain

Rp27.300.00

0

C.3.1. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp27.300.000 dan Rp27.300.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-lain per Tahun 2025 Audited pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sabang sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Aset Lain-lain Tahun 2025 Audited

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp 27,300,000
Mutasi Tambah	
Mutasi kurang	
Saldo per 31 Des 2025	Rp 27,300,000
Akumulasi Penyusutan dan amortisasi s.d. 31 Des 2025	Rp (27,300,000)
Nilai Buku per 31 Des 2025	0

Meskipun nilai buku dalam pembukuan Barang Milik Negara telah 0,- namun pada neraca tetap muncul angka 27.300.000,- karena



sebagaimana telah kami sebutkan tadi bahwa aset ini dalam proses penghapusan. Barang-barang tersebut adalah peralatan dan modal yang telah usang dimakan usia dan tidak dapat dipergunakan lagi.

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp
(27.300.000)*

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Tahun 2025 Audited adalah (27.300.000)

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 31
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Tahun 2025 Audited

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	27.300.000	27.300.000	0
Total		27.300.000	27.300.000	0

*Kewajiban
Jangka
Pendek Rp0*

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Aset Lainnya Balai Keekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp0.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

*Utang
kepada Pihak
Ketiga Rp0*

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/ atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.



Utang yang belum ditagihkan Rp0 **C.4.2. Utang yang belum ditagihkan**
Nilai Utang yang Belum Ditagihkan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp0.

Uang Muka dari KPPN Rp0 **C.4.3. Uang Muka dari KPPN**
Nilai Uang Muka dari KPPN Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp0.

Nilai uang muka dari KPPN adalah lawan transaksi (kredit) dari struktur pencatatan akuntansi berbasis akrual dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang dapat ditelusuri pada poin C.1.1.

Ekuitas Rp5.903.163.033 **C.5. Ekuitas**
Ekuitas Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp5.903.163.033 dan Rp6.216.974.509. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang akan dibahas pada poin E. Pos-pos Perubahan Ekuitas.



D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan**PNBP****Rp92.478.200****D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah sebesar Rp92.478.200 dan Rp51.607.600. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 32
Perbandingan Rincian Pendapatan-LO s.d. Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

JENIS PENDAPATAN	31 Des 2025	31 Des 2024	%
Pendapatan Jasa:			
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	477,600	(100.00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	358,200	-	-
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	2,890,000	2,670,000	8.24
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	43,670,000	28,670,000	52.32
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	45,560,000	19,790,000	130.22
Jumlah	92,478,200	51,607,600	79.19

Berdasarkan data tersebut, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak periode sampai dengan Tahun 2025 Audited mengalami peningkatan sebesar 79.19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan. Persentase meningkat 52.32 persen pada Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dilatarbelakangi bertambahnya jumlah kapal yang masuk dan keluar di Pelabuhan Sabang serta beratambahnya jumlah shift kapal cepat yang masuk dan keluar di Pelabuhan Balohan pada saat libur panjang, natal dan tahun baru. Selain itu peningkatan sangat signifikan pada Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan mencapai 130.22 persen karena jamaah Haji dan Umrah kini selain vaksin reguler meningitis pemerintah mewajibkan bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk vaksin polio sejak 2025.

Beban Pegawai**Rp4.671.123.59****1****D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp4.671.123.591 dan Rp4.196.230.218. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang



ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 33
Perbandingan Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,396,391,000	1,425,488,000	(2.04)
Beban Pembulatan Gaji PNS	21,006	24,375	(13.82)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	89,317,900	92,648,700	(3.60)
Beban Tunj. Anak PNS	27,425,446	27,732,336	(1.11)
Beban Tunj. Struktural PNS	17,640,000	20,580,000	(14.29)
Beban Tunj. Fungsional PNS	150,885,000	154,960,000	(2.63)
Beban Tunj. PPh PNS	9,214,524	8,700,830	5.90
Beban Tunj. Beras PNS	76,692,780	80,241,360	(4.42)
Beban Uang Makan PNS	241,713,000	182,153,000	32.70
Beban Tunjangan Umum PNS	10,175,000	9,065,000	12.24
Beban Gaji Pokok PPPK	144,359,533	32,036,000	350.62
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,064	597	413.23
Beban Tunj.Suami/Istri PPPK	7,508,880	-	
Beban Tunj.Anak PPPK	2,359,116	-	
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	12,375,000	5,045,000	145.29
Beban Tunjangan Beras PPPK	8,611,945	724,200	1,089.17
Beban Uang Makan PPPK	32,964,000	5,106,000	545.59
Beban Tunjangan Umum PPPK	3,795,000	-	
Beban Uang Lembur PNS	114,357,000	5,183,000	2,106.39
Beban Uang Lembur PPK	24,041,000	582,000	4,030.76
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PNS)	2,111,262,360	2,105,497,939	0.27
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK)	190,011,037	41,388,259	359.09
Pengembalian Belanja		(926,378)	(100.00)
Jumlah	4,671,123,591	4,196,230,218	11.32

Beban Pegawai sampai dengan Tahun 2025 Audited mengalami peningkatan sebesar 11,32 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan tahun 2025 terdapat Pembayaran 6 CPNS baru dan 12 pegawai PPPK baru yang gaji, tunjangan, uang makan dan lemburnya dibayarkan oleh Satker.

**Beban****Persediaan****Rp126.266.527****D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp126.266.527 dan Rp342.369.721.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Perbandingan Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	102,146,183	333,824,361	(69.40)
Beban Persediaan Bahan Baku	0	-	-
Beban Persediaan Lainnya	24,120,344	8,545,360	-
Jumlah	126,266,527	342,369,721	(63.12)

Penurunan konsumsi pemakaian barang persediaan 63.12 persen disebabkan beberapa hal diantaranya karena pada tahun sebelumnya telah dilakukan distribusi secara menyeluruh, sehingga pada tahun 2025 distribusi tidak dilakukan lagi secara besar-besaran. Meskipun terjadi penambahan PPPK diakhir tahun 2025, distribusi persediaan hanya dilakukan sebatas keperluan perkantoran paling mendesak saja seperti ATK.

Beban Barang**dan Jasa****Rp1.567.506.58****2****D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp1.567.506.582 dan Rp1.640.944.979.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.



Tabel 35
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

	31 DES 2025	31 DES 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	137,063,578	196,123,565	(30.11)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	970,100	856,000	13.33
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	92,930,000	83,352,000	11.49
Beban Barang Operasional Lainnya	-	1,615,471	(100.00)
Beban Bahan	98,028,618	289,789,127	(66.17)
Beban Honor Output Kegiatan	-	18,900,000	(100.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	191,854,900	171,730,700	11.72
Beban Peralatan dan mesin - Ekstrakomtabel	-	8,574,500	(100.00)
Beban Langganan Listrik	67,863,765	90,021,931	(24.61)
Beban Langganan Air	19,771,333	17,149,664	15.29
Beban Sewa	-	12340000	(100.00)
Beban Jasa Lainnya	959,024,288	750492021	27.79
	1,567,506,582	1,640,944,979	(4.48)

Beban barang dan jasa sampai dengan Tahun 2025 Audited mengalami penurunan sekitar 4,48 persen dibandingkan beban barang dan jasa pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pengurangan ini dipengaruhi adanya penurunan signifikan antara lain pada beban keperluan kantor, beban barang operasional lainnya, beban honor output kegiatan, beban peralatan mesin dan beban Sewa.

Beban

Pemeliharaan

Rp271.629.610

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp271.629.610 dan Rp391.976.141. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 36
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87,100,000	188,465,189	(53.78)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	175,143,410	199,923,722	(12.39)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9,386,200	3,587,230	161.66
Jumlah	271,629,610	391,976,141	(30.70)



Beban Pemeliharaan sampai dengan Tahun 2025 Audited mengalami penurunan sebesar 30,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

**Beban
Perjalanan
Dinas Rp
257.693.993**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp257.693.993 dan Rp650.095.118. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	174,173,993	328,990,118	(47.06)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	77,520,000	292,290,000	(73.48)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,000,000	28,815,000	(79.18)
Jumlah	257,693,993	650,095,118	(60.36)

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan Tahun 2025 Audited mengalami penurunan sekitar 60,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan menurunnya anggaran perjalanan dinas.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada masyarakat

**Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp2.555.780**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp2.555.780 dan Rp0.

Tabel 38
Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	%
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat	2,555,780	-	
Jumlah	2,555,780	-	



Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

**Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp680.661.528**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp680.661.528 dan Rp779.576.710.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 39
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

URAIAN BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	591,935,693	694,310,598	(14.74)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87,847,868	84,388,145	4.10
Beban Penyusutan Jaringan	877,967	877,967	0.00
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	680,661,528	779,576,710	(12.69)

D.9 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

**Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp2.900.000**

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Nilai Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited masing-masing adalah Rp2.900.000 dan Rp5.253.300 yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 40
Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024	%
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan pelepasan aset non lancar	-	-	-
Beban pelepasan aset non lancar	-	2,640,000	-
Surplus/Defisit pelepasan aset non lancar	-	(2,640,000)	-
Pendapatan keg. Non operasional lainnya	2,900,000	7,893,300	(63.26)
Beban keg. Non operasional lainnya	-	-	-
Surplus/Defisit keg. Non Ops Lainnya	2,900,000	7,893,300	(63.26)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	2,900,000	5,253,300	(44.80)

Kegiatan Non Operasional terdiri atas:

Beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp0 antara lain berupa:

- a. Beban pelepasan Aset senilai Rp0.

Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri atas:

Pendapatan kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp2.900.000 antara lain berupa:

- a. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp1.200.000. Berupa kelebihan bayar atas belanja uang makan tahun anggaran 2021.
- b. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu senilai Rp1.700.000. Berupa kelebihan bayar atas perjalanan dinas dalam kota dan transportasi lokal tahun anggaran 2021.



E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal**Rp6.216.974.509****E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas awal tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.216.974.509 dan Rp6.969.040.023.

Defisit LO**Rp(7.482.059.411)****E.2 Defisit LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah defisit sebesar Rp(7.482.059.411) dan Rp(7.944.331.987). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Penyesuaian**Nilai Aset Rp0****E.3 Penyesuaian Nilai Aset**

Penyesuaian atas nilai aset merupakan nilai koreksi pencatatan atas aset Barang Milik Negara. Penyesuaian nilai aset periode yang berakhir sampai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0.

Selisih**Revaluasi Aset
Rp0****E.4 Selisih Revaluasi Aset**

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir sampai Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi Aset**Non Revaluasi
Rp0****E.5 Koreksi Aset Non Revaluasi**

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(15.846.368).

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 2024 muncul akibat dilakukannya Reklasifikasi Bangunan Gedung Tempat Kerja (Gedung Kantor Induk) menjadi Tugu/Tanda Batas (Pagar Kantor Induk) / Membuat Nup baru.

**Transaksi Antar
Entitas****Rp7.168.247.935****E.6 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Tahun 2025



Audited dan Tahun 2024 Audited sebesar Rp7.168.247.935 dan Rp7.208.112.841 Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 41
Rincian Transaksi Antar Entitas

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024
Selisih DKEL dan DDEL		
Ditagihkan Ke Entitas Lain	7,179,023,404	7,290,679,141
Diterima Dari Entitas Lain	(95,378,200)	(59,500,900)
Sub Jumlah	7,083,645,204	7,231,178,241
Selisih TM dan TK		
Transfer Masuk	84,602,731	80,580,000
Transfer Keluar	-	(103,645,400)
Sub Jumlah	84,602,731	(23,065,400)
Transaksi Antar Entitas	7,168,247,935	7,208,112,841

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan (DDEL) dan belanja (DKEL) pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp7.179.023.404 sedangkan DDEL sebesar Rp(95.378.200).

E.6.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan Tahun 2025 Audited senilai Rp. 84.602.731. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp 0

E.6.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung adalah pengesahan pendapatan hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN. Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung adalah pengesahan



pengembalian Hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal Tahun 2025 Audited adalah sebesar Rp0.

Ekuitas Akhir

Rp5.903.163.03

3

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal Tahun 2025 Audited dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp5.903.163.033 dan Rp6.216.974.509. Nilai Ekuitas Akhir Desember 2025 diperoleh dari Nilai Ekuitas Awal Rp6.216.974.509 dikurang surplus/deficit Rp(7.482.059.411) ditambah Nilai transaksi antar entitas sebesar Rp7.168.247.935 Sehingga nilai Ekuitas Akhir Rp5.903.163.033.



F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

F.1. Kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca



IV. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN DIRJEN PERBENDAHARAAN S-2/PB/2026

1. MEKANISME DAN FORMAT PENGUNGKAPAN INFORMASI KINERJA TAHUN 2025 PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2025 (AUDITED)

A. Mekanisme Pelaporan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Rincian Output Tahun 2025 pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Untuk memastikan keandalan pelaporan dan pengungkapan pada LKKL atas capaian Rincian Output Tahun 2025, setiap K/L diharapkan dapat melakukan mekanisme/langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi atas setiap Rincian Output dan alokasinya yang terdapat dalam database RKA-K/L dan DIPA yang telah ditetapkan menjadi bagian dari Prioritas Nasional Tahun 2025
2. Terhadap Rincian Output yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2025, K/L memastikan bahwa telah dilakukan proses tagging secara akurat atas anggaran pada masing-masing satker pelaksana Prioritas Nasional Tahun 2025.
3. Setiap satker telah melakukan perekaman data target output dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya melalui Aplikasi SAKTI.
4. Setiap jenjang pelaporan memastikan tidak terdapat perbedaan data yang signifikan/anomali data pada pengungkapan capaian RO antara lain:
 - a. Perbandingan Target Volume RO dengan Realisasi Volume (RO);
 - b. Perbandingan Realisasi Volume (RO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran; dan
 - c. Perbandingan Progres Capaian RO dengan Persentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Volume RO.
5. Perekaman data pada poin 4 dilakukan berpedoman dengan petunjuk teknis Validasi Data Realisasi Capaian Output Satker.
6. Berdasarkan data yang telah direkam dan divalidasi tersebut menjadi bahan untuk pelaporan dan pengungkapan capaian RO Tahun 2025 pada Laporan Keuangan secara berjenjang dari tingkat satker sampai pada LKKL.

B. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2)



pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Pengungkapan capaian Rincian Output Per Fungsi sebagai berikut: Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada satuan kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang terdapat pada fungsi (7) Kesehatan dengan rincian sebagaimana terlampir.

C. Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Capaian rincian output (RO) yang ditagging sebagai Prioritas Nasional dapat diungkapkan pada Catatan Lainnya sebagaimana contoh di bawah ini dan data capaian RO secara lengkap disampaikan dalam lampiran LKKL.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada satuan kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 4 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional 4 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor Kesehatan. PN 4 memiliki 17 program prioritas, 17 kegiatan prioritas, 17 proyek prioritas, dan 17 rincian output yang tersebar di 1 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp 1.339.433.000,- dan realisasi sebesar Rp457.993.946,- dengan rincian sebagaimana terlampir berikut.



Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sosialisasi dan Diseminasi (HS-29)	187,880,000	-	0.0	469	469	orang	100	
2	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (HS-29)	20,445,000	12,285,000	60.1	292	292	Orang	100	
3	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan (HS-29)	25,998,000	1,008,000	3.9	31	31	layanan	100	
4	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut (HS-29)	140,330,000	3,060,000	2.2	66	66	layanan	100	
5	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan (HS-29)	115,500,000	56,980,000	49.3	175	175	layanan	100	
6	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus (HS-29)	80,000,000	72,160,000	90.2	50	50	layanan	100	
7	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD (HS-29)	14,712,000	6,032,000	41.0	12	12	layanan	100	
8	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes (HS-29)	49,827,000	23,552,749	47.3	17	17	layanan	100	
9	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS-29)	2,892,000	1,320,000	45.6	6	6	layanan	100	
10	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS-29)	4,320,000	-	0.0	12	12	layanan	100	
11	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS-29)	15,480,000	7,650,000	49.4	9	9	layanan	100	
12	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS-29)	6,360,000	-	0.0	12	12	layanan	100	
13	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS-29)	7,884,000	3,748,000	47.5	6	6	layanan	100	
14	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS-29)	32,730,000	31,648,000	96.7	6	6	layanan	100	
15	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS-29)	3,880,000	1,330,000	34.3	4	4	layanan	100	
16	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (HS-29)	531,781,000	237,220,197	44.6	33	33	Paket	100	
17	Pelatihan Kesehatan (HS-29)	99,414,000	-	0.0	7	7	Orang	100	
Jumlah		1,339,433,000	457,993,946	34.2					

2. DATA ASET DAN KEWAJIBAN KEMENTERIAN/LEMBAGA KABINET MERAH PUTIH YANG MENERIMA LIKUIDASI PADA LKKL TAHUN 2025 (AUDITED)

NIHIL



DAFTAR LAMPIRAN

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca Percobaan
6. SHR (Rekonsiliasi Sakti-Span)

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (449984) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 2:33 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	107,435,949	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	44,612,656	0
0.0	131111	Tanah	1,483,178,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,729,050,657	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,259,854,800	0
0.0	134113	Jaringan	19,426,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,746,797,926
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	982,622,525
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	10,974,578
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	27,300,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	27,300,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,179,023,404
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	95,378,200	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	84,602,731
0.0	391111	Ekuitas	0	6,216,974,509
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	358,200
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	2,890,000
3.0	425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	43,670,000
3.0	425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	45,560,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,200,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,700,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,396,391,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21,006	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	89,317,900	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	27,425,446	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	17,640,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	150,885,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	9,214,524	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	76,692,780	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	241,713,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,175,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	144,359,533	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,064	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,508,880	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,359,116	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	12,375,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	8,611,945	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (449984) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM
Tgl Cetak : 30/04/26 2:33 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	32,964,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	3,795,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	114,357,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	24,041,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,111,262,360	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	190,011,037	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	137,063,578	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	970,100	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	92,930,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	98,028,618	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	191,854,900	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	67,863,765	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	19,771,333	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	959,024,288	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87,100,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	175,143,410	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	174,173,993	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	77,520,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	591,935,693	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87,847,868	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	877,967	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	102,146,183	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9,386,200	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	2,555,780	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	24,120,344	0
JUMLAH			24,343,673,873	24,343,673,873

Keterangan :

FINAL

Sabang, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



KHAIDIR

NIP 197906242012121001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (449984) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM
Tgl Cetak : 30/04/26 2:31 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	152,048,605	58,849,270	93,199,335	158.37
JUMLAH ASET LANCAR	152,048,605	58,849,270	93,199,335	158.37
ASET TETAP				
Tanah	1,483,178,000	1,483,178,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	10,729,050,657	10,455,399,940	273,650,717	2.62
Gedung dan Bangunan	4,259,854,800	4,259,854,800	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	19,426,000	19,426,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(10,740,395,029)	(10,059,733,501)	(680,661,528)	6.77
JUMLAH ASET TETAP	5,751,114,428	6,158,125,239	(407,010,811)	(6.61)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	27,300,000	27,300,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(27,300,000)	(27,300,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	5,903,163,033	6,216,974,509	(313,811,476)	(5.05)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,903,163,033	6,216,974,509	(313,811,476)	(5.05)
JUMLAH EKUITAS	5,903,163,033	6,216,974,509	(313,811,476)	(5.05)
JUMLAH EKUITAS	5,903,163,033	6,216,974,509	(313,811,476)	(5.05)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,903,163,033	6,216,974,509	(313,811,476)	(5.05)

Keterangan :
FINAL

Sabang, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT 05
SATUAN KERJA : BALAI KEKARANTINAMAN KESEHATAN KELAS II SABANG 449984

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM
 Tgl Cetak : 30/04/26 2:32 PM
 Halaman : 2
 lap_face_satker_new_poc

URAIAN	2025					2024				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%		
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0		
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0		
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0		
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	9,139,825,000	7,179,023,404	(1,960,801,596)	78.55	7,609,503,000	7,290,679,141	(318,823,859)	95.81		
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0		

Keterangan :
FINAL

Sabang, 30 April 2026

Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Menular
Khususnya Penyakit Menular Infeksi
Khususnya Penyakit Menular Infeksi



KHAIDIR
NIP. 197906242012121001



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (449984) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
SABANG

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 2:32 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	92,478,200	51,607,600	40,870,600	79.195
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	92,478,200	51,607,600	40,870,600	79.195
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	92,478,200	51,607,600	40,870,600	79.195
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,671,123,591	4,196,230,218	474,893,373	11.317
Beban Persediaan	126,266,527	342,369,721	(216,103,194)	(63.12)
Beban Barang dan Jasa	1,567,506,582	1,640,944,979	(73,438,397)	(4.475)
Beban Pemeliharaan	271,629,610	391,976,141	(120,346,531)	(30.703)
Beban Perjalanan Dinas	257,693,993	650,095,118	(392,401,125)	(60.361)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,555,780	0	2,555,780	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (449984) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
SABANG

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 2:32 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	680,661,528	779,576,710	(98,915,182)	(12.688)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,577,437,611	8,001,192,887	(423,755,276)	(5.296)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,484,959,411)	(7,949,585,287)	464,625,876	(5.845)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(2,640,000)	2,640,000	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	2,640,000	(2,640,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,900,000	7,893,300	(4,993,300)	(63.26)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,900,000	7,893,300	(4,993,300)	(63.26)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,900,000	5,253,300	(2,353,300)	(44.797)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,482,059,411)	(7,944,331,987)	462,272,576	(5.819)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,482,059,411)	(7,944,331,987)	462,272,576	(5.819)

Keterangan :
FINAL

Sabang, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Khaider

KHAIDIR
NIP. 197906242012121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (449984) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
SABANG

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 2:33 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,216,974,509	6,969,040,023	(752,065,514)	(10.79)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,482,059,411)	(7,944,331,987)	462,272,576	(5.82)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(15,846,368)	15,846,368	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(15,846,368)	15,846,368	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,168,247,935	7,208,112,841	(39,864,906)	(0.55)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(313,811,476)	(752,065,514)	438,254,038	(58.27)
EKUITAS AKHIR	5,903,163,033	6,216,974,509	(313,811,476)	(5.05)

Keterangan :

FINAL

Sabang, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



KHAIDIR

NIP 197906242012121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KPPN BANDA ACEH

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 449984 - BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 30/04/26 2:30

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	9,139,825,000	9,139,825,000	0
2	Belanja	7,179,023,404	7,179,023,404	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	94,867,000	94,867,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	95,378,200	95,378,200	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Januari 2026

